



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ITSBAT NIKAH

MENURUT HUKUM ISLAM UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

(Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan

Agama Kabupaten Indramayu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (AAS)
Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Disusun Oleh:

QODARIAH AMIARSIYIH ISTIQOMAH

NIM: 1410210017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

2015



ABSTRAK

**QODARIAH AMIARSIHLI : ITSBAT NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM
UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)**
NIM: 1410210017

Pernikahan merupakan suatu keseimbangan dalam melakukan antara hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun ketika pernikahan itu sirri dan salah satu ingin menggugat perceraian maka pernikahan tersebut harus di itsbatkan dahulu di Pengadilan Agama, seperti pada kasus nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im yang mana istri ingin menggugat cerai suaminya.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul tersebut, yakni: pertama, Bagaimana itsbat nikah menurut hukum Islam dan duduk perkara itsbat nikah nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im? kedua, Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im sudah sesuai dengan konsep dasar Hukum Islam?

Adapun penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui itsbat nikah menurut hukum Islam dan duduk perkara nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im. kedua, untuk mengetahui analisis putusan nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya penyusunan bahan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi, dan dokumen kemudian dianalisis, dengan mengambil studi kasus itsbat nikah untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama, itsbat nikah sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang adanya, duduk perkara nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im pengajuan itsbat nikah untuk gugatan perceraian. kedua, pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara berpacu pada UU, yurisprudensi yang berketetapan di MA dan ijtihad para hakim. Hakim memutuskan perkara nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im dengan putusan sela karena itsbat nikah bukan masalah pokok maka itsbat nikah dan gugatan perceraian di akumulasikan (di gabung).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ITSBAT NIKAH, MENURUT HUKUM ISLAM UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN (Study Kasus Perkara Nomor 253 Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)” oleh Qodariah Amiarsyih Istiqomah, NIM. 1410210017, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 30 Juni 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (satu) pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, 30 Juni 2015

Sidang Munaqosyah

Ketua,
Merangkap Anggota



M. Amsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris,
Merangkap Anggota

Ahmad Rofi'i, M.A., LL.M
NIP. 19760725 200112 1 002

Anggota:

Penguji I,

Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
NIP. 19570909 198303 1 003

Penguji II,

Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730526 200501 1 004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Penelitian.....	11
E. Langkah-langkah Penelitian	12
 BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN,ITSBAT NIKAH, DAN	
PERCERAIAN.....	17
A. Pengertian, Syarat & Rukun Pernikahan dan Hukum Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	19



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Hukum Nikah	23
B. Itsbat Nikah.....	24
1. Pengertian Itsbat Nikah	24
2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Itsbat Nikah	25
3. Faktor yang Menyebabkan Mengajukan Itsbat Nikah.....	27
4. Pihak yang Berhak Mengajukan Itsbat Nikah	30
C. Perceraian	31
1. PengertianPerceraian	31
2. Bentuk-bentuk Perceraian	33
3. Macam-macam Perceraian	34
4. Dampak Perceraian	38

BAB III GAMBARAN OBYEKTIFITAS PENGADILAN AGAMA

INDRAMAYU	41
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Indramayu	41
B. Kondisi Obyektifitas dan Susunan Organisasi Pengadilan Agama Indramayu	47
C. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Indramayu	55
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Indramayu	57
E. Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Indramayu	63

BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam.....	69
--	----



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

B. Duduk Perkara Terjadinya Itsbat Nikah.....	74
C. Alasan Hakim Mempertimbangkan Putusan Sela.....	79
D. Penetapan Putusan Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im	81
E. Analisis Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Pernikahan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, Pergaulan antara laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil pernikahan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.¹

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.² Dalam ayat Al Qur'an surat Annisa' ayat 1:

¹ Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal 213-214

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), Hal 41



يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An Nisaa : 1)

Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau *stabilitas*.³ Di dalam kehidupan masyarakat terdapat empat macam norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.⁴

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sedangkan menurut agama Islam pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang

³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), Hal 17

⁴ Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan kecakapan berbangsa dan bernegara*, (Bandung: Pribumi Mekar, 2007), Hal 4

⁵ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), Hal 5



perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.⁶

Pelaksanaan akad dilakukan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata ijab wali pihak perempuan melalui walinya atau wakil wali yang sah, dan kabul dari pihak laki-laki. Hal ini berarti dalam melaksanakan akad harus ada dan dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, Wali yang sah dari perempuan, dua orang saksi laki-laki.

Orang yang melakukan pernikahan secara agama dan tidak berkekuatan hukum maka pernikahan tersebut adalah pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Adapun mengenai pernikahan yang tidak tercatat, pernikahan tersebut rawan dengan penyelundupan hukum untuk tujuan-tujuan tertentu.

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya pernikahan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1947 tentang Pernikahan. Pasal 2 Ayat 2 tersebut mengharuskan pencatatan pernikahan, terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Di dalam UU

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press 1999), Hal 14



No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 2 pasal 2 tersebut merupakan satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya dimuat di dalam PP No 9 Tahun 1975.⁷ Dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan pasal 6.⁸

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi, walaupun pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh 1 ayat didalam UUP, namun sebenarnya pencatatan ini sangat urgen,⁹ sehingga orang yang ingin mengakhiri suatu

⁷Ini berbeda dengan ayat 1 yang didalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP pasal 3 dinyatakan: (1) Setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Lihat Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*(Jakarta: Kencana 2004), Hal 122.

⁸Pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Lihat Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hal 123-124

⁹Dengan adanya akta nikah, maka suami atau istri bersangkutan mempunyai alat bukti perkawinan yang sah berdasarkan UUP No.1/1974, yang dapat digunakan apabila diperlukan, baik sebagai suami istri, maupun sebagainya. Wasman dan Wardah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

hubungan atau melakukan perceraian maka salah satu dari kedua belah pihak harus mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama terdekat untuk diproses. Adapun perceraian yang dilakukan pasangan yang melakukan pernikahan dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka pasangan tersebut harus mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu untuk membuktikan pernikahannya.¹⁰

Itsbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Apalagi di daerah pedesaan, kawin-cerai begitu mudah dilakukan. Celakanya, perceraian itu bukan disampaikan langsung oleh sang suami. Tidak sedikit yang melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang istri. Terkadang pula suami mengucapkan cerai kepada istrinya melalui telepon. Setelah bercerai, perempuan dengan berbekal harta pribadinya membawa anaknya pulang ke rumah orangtuanya. Tidak ada pembagian harta bersama (gono-gini) yang didapat karena umumnya harta yang dibagikan tidak ada. Kalaupun ada kekayaan bersama dan bekas istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan. Anak pun menjadi korban perceraian karena bekas pasangan suami-istri yang sama-sama sudah menikah lagi, terputus hubungan komunikasinya. Oleh karena itu, diperlukannya pencatatan perkawinan. Bagi yang

Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal 67

¹⁰Wasman dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hal 62



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah).

Mengenai perceraian, boleh dilakukan apabila mengandung kemashlahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian bisa merupakan suatu alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah pernikahan seharusnya tidak ada perceraian. Secara moral, perceraian sebagai perbuatan halal dimurkai oleh Tuhan. Walaupun halal, semua itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami-istri dan keluarganya serta pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.¹¹

Adapun lembaga yang menangani itsbat nikah (penetapan nikah) di Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Kompilasi Hukum Islam (KHI)/ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) KHI bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan

¹¹Saebani Ahmad Beni, Syamsul Falah, dan Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), Hal 147



Agama.¹² Dalam masalah Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3a) dijelaskan bahwa Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dilakukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹³

Hal ini berkesesuaian dengan beberapa perkara yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu dan juga dari hasil diskusi para pihak kepada lembaga pengadilan dapat diberikan data bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diterima adalah perkara permohonan yang sesuai dengan kewenangan peradil agama yakni :¹⁴

1. Permohonan Itsbat Nikah didasarkan pada adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama namun tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
2. Peraturan yang menjadi dasar perkara permohonan Itsbat Nikah adalah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4), yakni ;
 - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;
 - (3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press 1999), Hal14

¹³Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No. 1 TH 1991*berikut penjelasan, (Surabaya: Karya Anda, 1991), Hal 15

¹⁴Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; *Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), Hal 181



- b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Dari peraturan atau sumber hukum yang ada tersebut di atas, terdapat perkara yang dapat diteliti yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Indramayu, yakni adanya pengajuan permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Dalam skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Indramayu, karena dari penelitian yang pernah dilakukan bahwa di Pengadilan Agama Indramayu antara tahun 2010-2013 terdapat beberapa pasangan suami istri yang



melakukan itsbat nikah untuk tujuan perceraian, salah satunya adalah perkara nomor 2573/Pdt.G/2013/PA/Im.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang pernikahan tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena itu setiap pernikahan yang tidak dicatatkan telah melanggar undang-undang tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Namun pada kenyataannya terjadi dimasyarakat pernikahan yang tidak dicatatkan bisa mendapat kejelasan hukum melalui itsbat nikah dengan beralasan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7. Hal tersebut menjadi sebuah kontradiktif dimana disatu pihak pemerintah mewajibkan bagi warganya untuk mencatatakan pernikahan, namun dipihak lain ada celah bagi pelaku pernikahan dibawah tangan untuk mengesahkan pernikahannya melalui jalur istbat nikah.

Untuk lebih mempermudah pengkajian dalam penelitian, diperlukan adanya suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dimaksud melalui tiga tahapan yaitu :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian, wilayah penelitian dalam mengkaji masalah di atas termasuk dalam wilayah penelitian hukum acara peradilan agama.



- b. Pendekatan Penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penulis mengadakan studi langsung lapangan di bantu studi pustaka sebagai bahan acuan.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah “ketidak jelasan pernikahan untuk perceraian”

2. Pembatasan Masalah

- a. Dalam usaha menghindari ketidak jelasan serta agar fokus pada pokok masalah yang dikaji, maka dibuatlah suatu usaha pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas.
- b. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Itsbat nikah, Menurut Hukum Islam untuk melakukan Perceraian (Studi kasus Perkara: 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Indramayu)

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Itsbat Nikah menurut hukum Islam dan duduk perkara Itsbat Nikah nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im sudah sesuai dengan konsep dasar Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui itsbat nikah menurut hukum Islam dan duduk perkara itsbat nikah nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im dengan konsep dasar Hukum Islam



D. Kerangka Pemikiran

Masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Itsbat Nikah, Menurut Hukum Islam untuk melakukan Perceraian” (Studi kasus Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama kabupaten Indramayu).

Berdasarkan judul yang telah disebutkan, maka penulis akan membahas mengenai itsbat nikah pada pernikahan sirri secara yuridis. Yang dimaksudkan dengan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: *menurut hukum: secara hukum*.¹⁵ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penulis akan menelaah itsbat nikah pada pernikahan sirri secara hukum yang berlaku.

Islam dan undang-undang perkawinan merupakan informasi dan pengetahuan tentang nikah, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, di samping merupakan upaya preventif terhadap berkembangnya bentuk pasangan di luar nikah, juga membantu penanganan dalam masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut sesuai dengan UU

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. IV(Jakarta:Balai Pustaka,2005), Hal1278

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hinggaUkhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), Hal 257



Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷ Sedangkan *itsbat* sendiri berasal dari bahasa Arab *atsbata - yutsbitu - itsbatan* yang artinya adalah penguatan.¹⁸ Sedang dalam kamus ilmiah populer kata *itsbat* diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.¹⁹ Maka secara garis besar dapat ditarik gambaran umum bahwasanya yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah “*Itsbat Nikah, Menurut Hukum Islam untuk melakukan Perceraian*” (Studi kasus Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Indramayu).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta,²⁰ metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap obyek yang diteliti kemudian data yang didapat dianalisis dan disimpulkan.

¹⁷Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.), Hal 5.

¹⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV(Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) Hal 145

¹⁹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994), Hal 273.

²⁰Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), Hal 87



2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto di lihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu mengadakan studi langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang autentik dan dibantu dengan studi pustaka sebagai bahan penunjang penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu kelas IA

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu:

a. Data Primer:

Putusan Perkara, 2573/Pdt.G/2013/PA.Im

UU PA,

UU Perkawinan,

KHI

b. Data Sekunder :

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1999) Hal 67



Data sekunder ini diperoleh dari sumber buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya:

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*.(Yogyakarta: Teras, 2011),Saebani Ahmad Beni,Syamsul Falah, dan Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Bandung : Pustaka Setia,2011),Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*(Jakarta: Kencana 2004)

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab, kepada hakim yang menangani perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Indramayu untuk mendapatkan keterangan dan informasi mengenai data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Dan juga apabila peneliti ingin



mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²²

b. Observasi

Yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²³ Dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Pengadilan Agama Indramayu guna memperoleh data empirik tentang pelaku Itsbat nikah di Pengadilan Agama Indramayu dan Faktor penyebab Itsbat nikah di Pengadilan Agama Indramayu.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan pengumpulan data sumber-sumber kepustakaan, baik melalui penelusuran kepustakaan dan penelaahnya guna menganalisa teori-teori dasar dari konsep yang telah ditemukan oleh para ahli mengenai masalah Itsbat nikah.

d. Studi Dokumen

Yaitu dengan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, Baik melalui penelusuran dan penelaahnya guna menganalisa teori-teori dasar dari konsep yang telah ditemukan oleh para ahli mengenai masalah Itsbat nikah.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010),. Hal 194

²³Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Perjalanan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal 18



6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis dan kualitatif, yaitu proses pengklasifikasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Adapun cara kerjanya sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan sebagainya.
- b. Mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi data, yaitu membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan dari para pelaku Itsbat nikah khususnya di Pengadilan Agama Indramayu.
- c. Menyusun seluruh data kedalam satuan-satuan menurut masalah.
- d. Mengadakan pemeriksaan keontentikan data melalui metode penelitian kepustakaan.

Menyimpulkan data yaitu membuat kesimpulan secara umum dan khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. - Itsbat memiliki arti “menetapkan” maka itsbat nikah ialah menetapkan pernikahan, dalam KHI penentuan itsbat nikah terdapat pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e), itsbat nikah sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang ada. Dari hukum syar’i sendiri memang tidak satupun nash maupun al-Qur`an maupun hadist yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Dalam kondisi sekarang pencatatan perkawinan menjadi keharusan, hal ini disebabkan banyaknya mudharat yang timbul apabila tidak dicatat.
- Duduk perkara nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im alat bukti surat akta nikah Penggugat dan Tergugat tidak ada, karena Penggugat tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari PPN, Penggugat memerlukan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum dan perceraian, maka dari itu Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian teradap Termohon.
2. Pertimbangan Hakim yaitu melihat berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena kutipan akta nikahnya tidak ada maka perlu di itsbatkan dulu sehingga majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat sah atau tidaknya. Apabila perkawinan dilaksanakan secara Hukum Islam maka perkawinan dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum syar’i



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik Al-Qur`an maupun Hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan, untuk sekarang ini menjadi keharusan bagi seseorang, karena menimbulkan banyak sekali mudharat yang timbul bila tidak dilakukan pencatatan maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan putusan sela Penggugat maju ke pemeriksaan perceraianya dengan melihat sebab-sebab dan alasan-alasan yang di ajukan Penggugat apa yang menjadi dasar. Itsbat nikah bukan perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama di kumulasi (di gabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok. Dasar pertimbangan Hakim ialah Undang-undang, yurisprudensi yang berkekuatan tetap di Mahkamah Agung (MA) dan ijtihad para Hakim sebelum memutus perkara dan kembali pada tujuan hukum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Saran

1. Dalam memutus suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas hukum perdata maupun asas-asas hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.
2. Perlu ada tindak lanjut Bagi Pihak terkait seperti KEMENAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan Nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu akan pentingnya pencatatan nikah.
3. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pernikahan sirri terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah layak untuk di amandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*,
Bandung: Pustaka Media, 2013

Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media 2007

Mubarok, Jaih *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2005

Aa Nurdiman, *Pendidikan dan Kewarganegaraan kecakapan berbangsa
dan bernegara*, Bandung: Pribumi Mekar, 2007

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Lengkapi
Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press,
1999

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di
Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU
No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia;
Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

Saebani Ahmad Beni, Syamsul Falah, dan Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata
Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011



Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No 1/1991*, Surabaya: Karya Anda, 1991

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1999

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, *Analisi Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Perjalanan*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Taqiyyudin Abi Bakr ibn Muhammad ibn ‘Abdi al-Mu’min al-Hishny, *Kifayatul Akhyar*, (Quwait, CD Maktabah Syamilah, Dar al-Shiya



- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.30, 1999
- Muhamad Hasbi ash- Shiddiqiey, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984
- Jalaluddin `Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, Semarang: Toha Putra
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala mazahibil Arba`ah*, juz IV
- Kamus Hukum Bandung: Citra Umbara, 2008
- Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2008
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty. 1982.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke tiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993



<http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja->

[dampak-perceraian.html](http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html)/di ambil pada tanggal 06/06/2014 pukul

19.20 Wib

Pengadilan Agama Indramayu: *Profil Pengadilan Agama Indramayu*

Pengadilan Agama Indramayu: *Gambaran Umum Pengadilan Agama Indramayu*

Pengadilan Agama Indramayu: *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu*

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang, *Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Pengadilan Agama Indramayu: *Tugas Pokok Pengadilan Agama Indramayu*

Pengadilan Agama Indramayu: *Fungsi Pengadilan Agama Indramayu*

Pengadilan Agama Indramayu: *Standart Operation Procedure Penerimaan Perkara dan Pelayan Lainnya*

Abdul Manan, dkk, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

<http://www.nu.or.id/Situs> Resmi Nahdlatul Ulama NU Online kepastian Hukum âItsbat Nikahâ Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.htm diambil pada tanggal 30/01/2015 pukul 02.40 WIB



Indramayu: *Surat Penetapan Itsbat Nikah dengan Putusan Sela Nomor : 2573/Pdt.G/2013/PA.Im*

Wawancara Di Pengadilan Agama Indramayu dengan Hakim Pengadilan Agama Indramayu , pada tanggal 28 Oktober 2014.

Wawancara Di Pengadilan Agama Indramayu dengan Hakim Pengadilan Agama Indramayu , pada tanggal 17 Oktober 2013.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2010), Hal 93

Abdul Manaf, *Refleksi beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: CV.Mandar Maju, Cet.I., 2008

